ANALISIS DESKRIPTIF HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN DI JAWA TENGAH

Navira Jingga Firdani[1], Shabrina Asti Aulia[2], Anjelina Karyn[3], Jundi Hamdan Fadhlurrohman[4], Nina Farliana[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Negeri Semarang*
E-mail : [1]navirajinggaf@students.unnes.ac.id, [2]shabrina20asti@students.unnes.ac.id, [3]anjelinakaryn@students.unnes.ac.id, [4]jundihamdan@students.unnes.ac.id, [5]ninafarliana@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to descriptively analyze the relationship between education as an investment in human capital and the open unemployment rate in Central Java Province during the 2021–2025 period. Unemployment remains a key issue in regional economic development, despite continuous improvements in educational attainment. Education is considered a crucial factor in enhancing human resource quality and increasing employment opportunities. This research employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from official publications of the Central Java Provincial Statistics Office (BPS) and district/city BPS, covering all 35 districts/cities from 2021 to 2025. The variables analyzed include the Open Unemployment Rate (OUR) and Average Years of Schooling (AYS). Data analysis is conducted through annual trend analysis, inter-regional comparisons, and descriptive statistics. The results indicate that the average Open Unemployment Rate in Central Java shows a declining trend, from 5.79% in 2021 to approximately 4.35% in 2025. In contrast, the Average Years of Schooling increased from 7.95 years to 8.39 years over the same period. However, significant disparities exist across regions, where urban areas tend to have higher education levels but also relatively higher unemployment rates due to stronger job competition and skill mismatches with labor market demands. In conclusion, education as an investment in human capital plays an important role in improving workforce quality. However, improvements in education alone are not sufficient to reduce unemployment without being accompanied by job creation and better alignment between education and industry needs. These findings are expected to inform policymakers in designing more effective education and labor policies at the regional level.

Keywords : *Keyword: Education, Unemployment, Human Capital, Labor Market, Central Java*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif hubungan antara pendidikan sebagai investasi human capital dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025. Pengangguran masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah, meskipun tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat. Pendidikan dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS kabupaten/kota, mencakup seluruh 35 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Variabel yang dianalisis meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Analisis data dilakukan melalui analisis tren tahunan, perbandingan antarwilayah, serta statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata TPT di Jawa Tengah mengalami tren penurunan dari 5,79% pada tahun 2021 menjadi sekitar 4,35% pada tahun 2025. Sebaliknya, RLS meningkat dari 7,95 tahun menjadi 8,39 tahun pada periode yang sama. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup besar antarwilayah, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi tetapi juga tingkat pengangguran yang relatif lebih besar akibat tingginya persaingan kerja dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Kesimpulannya, pendidikan sebagai investasi human capital berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, peningkatan pendidikan saja belum cukup untuk menurunkan pengangguran tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja serta kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih efektif di tingkat daerah.

Kata Kunci : *Pendidikan, Pengangguran, Human Capital, Pasar Tenaga Kerja, Jawa Tengah*

PENDAHULUAN

Permasalahan pengangguran terbuka masih menjadi salah satu isu ekonomi yang mendapat perhatian serius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan angka kemiskinan, serta memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat pengangguran adalah melalui investasi pada sumber daya manusia atau human capital, khususnya melalui sektor pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kemampuan, produktivitas, serta daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Dengan kualitas pendidikan yang semakin baik, peluang individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil juga akan semakin besar (Arifah & Cahyono, 2025).

Secara teoritis, konsep human capital menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan individu dalam menghasilkan nilai ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya mempunyai peluang kerja yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan di dunia industri. Oleh karena itu, investasi pada sektor pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mengurangi tingkat pengangguran (Yanti, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah lulusan pendidikan tidak selalu diikuti dengan terserapnya tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan dunia kerja atau yang dikenal sebagai skill mismatch. Situasi tersebut dapat memicu munculnya pengangguran terdidik, yaitu individu yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan investasi human capital dalam menurunkan tingkat pengangguran (Herdiwiguna & Fadli, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyulianti et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan peluang kerja masyarakat di Jawa Tengah. Namun demikian, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena hanya membahas pengaruh pendidikan secara umum dan belum mengaitkannya secara lebih mendalam dengan konsep investasi human capital dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa faktor investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pendidikan secara bersama-sama memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di wilayah Pulau Jawa. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara investasi human capital melalui pendidikan dengan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu masih kurangnya kajian yang mengintegrasikan konsep investasi sumber daya manusia

dengan analisis pengangguran pada tingkat regional secara lebih komprehensif (Salsabhila & Sakti, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh investasi di bidang pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Dengan memahami hubungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem pendidikan, serta mengembangkan program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan human capital dan pasar tenaga kerja (Arizal et al., 2025).

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara human capital dan pengangguran, khususnya pada tingkat regional. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta peluang kerja di masa mendatang (Herdiwiguna & Fadli, 2025).

METODE

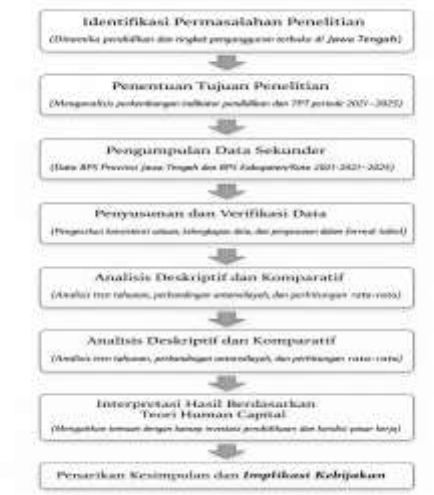
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari publikasi resmi BPS. Pendekatan ini dipilih untuk menyajikan kondisi secara objektif, terukur, dan berbasis indikator statistik, tanpa bertujuan menguji hubungan sebab-akibat. Fokus penelitian adalah menggambarkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka sebagai indikator pasar tenaga kerja dan pendidikan sebagai representasi human capital di Jawa Tengah periode 2021–2025. Periode tersebut dipilih karena mencerminkan fase pemulihan pascapandemi. Objek penelitian mencakup seluruh 35 kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Unit analisis berupa data kabupaten/kota per tahun, sehingga memungkinkan analisis tren waktu dan perbandingan antarwilayah, dengan tetap menggunakan pendekatan deskriptif tanpa regresi data panel.

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS kabupaten/kota, serta data pendukung seperti UMK. Pemilihan BPS didasarkan pada kredibilitasnya sebagai penyedia data resmi yang terstandar, konsisten, dan tervalidasi, sehingga menjamin validitas perbandingan antarwilayah dan periode. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi variabel, pengunduhan data dari publikasi resmi (Jawa Tengah Dalam Angka dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2021–2025), serta pengecekan konsistensi definisi dan satuan. Data kemudian disusun dalam Microsoft Excel untuk memudahkan pengolahan, perhitungan, dan penyajian. Variabel utama meliputi tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam persentase serta indikator pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan persentase penduduk minimal lulusan SMA. Selain itu, digunakan variabel pendukung seperti pertumbuhan ekonomi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif melalui tren tahunan dan perbandingan antarwilayah. Penelitian juga menyajikan statistik deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, dan maksimum untuk memperkuat interpretasi hasil.Selain itu, dilakukan analisis

keterkaitan secara deskriptif antara indikator pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka. Analisis ini bertujuan untuk melihat pola umum, seperti kecenderungan wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi terhadap kondisi pengangguran. Namun, analisis ini tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat, melainkan hanya sebagai pengamatan pola berdasarkan data.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori human capital, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja. Interpretasi dilakukan secara hati-hati agar tetap sesuai dengan pendekatan deskriptif dan tidak melampaui batas metode penelitian. Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang sistematis, komprehensif, dan berbasis data empiris mengenai dinamika pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025. Untuk memperjelas alur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, tahapan-tahapan tersebut disajikan dalam bentuk diagram alur yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Flowchart Alur Penelitian Periode 2021–2025

Berdasarkan alur penelitian yang disajikan pada Gambar 2, tahapan analisis dalam penelitian ini difokuskan pada penyajian data secara sistematis melalui analisis tren tahunan dan perbandingan antarwilayah. Analisis tren dilakukan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel dari tahun ke tahun selama periode 2021–2025, sedangkan perbandingan antarwilayah bertujuan untuk menunjukkan variasi kondisi di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari tahapan analisis tersebut kemudian dipaparkan secara terstruktur pada bagian berikutnya guna memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai dinamika tingkat pengangguran terbuka dan indikator pendidikan. Penyajian ini diharapkan mampu memperlihatkan pola perkembangan serta perbedaan kondisi antar daerah selama periode penelitian, sehingga pembahasan yang dilakukan memiliki dasar data yang jelas dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis deskriptif dan komparatif terhadap perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), indikator human capital melalui Rata-rata Lama Sekolah

(RLS), serta fluktuasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di seluruh 35 wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2025. Penyajian hasil dilakukan secara sistematis melalui analisis tren tahunan, perbandingan antar wilayah, serta pembahasan keterkaitan antar variabel berdasarkan kerangka teori human capital, menggunakan data resmi yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan BPS kabupaten/kota, serta dokumen resmi pemerintah daerah terkait penetapan UMK.

Periode penelitian 2021-2025 dipilih secara sengaja didasari oleh urgensi pengamatan fase pemulihan pascapandemi COVID-19, dimana terjadi penataan ulang pada struktur tenaga kerja dan investasi pendidikan. Analisis antar wilayah dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi variasi kecepatan pemulihan ekonomi dan bagaimana investasi sumber daya manusia berinteraksi dengan dinamika pengangguran dan kebijakan upah minimum di masing-masing daerah.

Analisis Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makroekonomi paling krusial yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang masih belum terserap di pasar tenaga kerja serta masih aktif mencari pekerjaan. Indikator ini juga digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu perekonomian serta mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, pergerakan angka TPT selama periode 2021-2025 menggambarkan proses pemulihan pasar tenaga kerja pasca-tekanan besar yang di timbulkan oleh pandemi COVID-19. Sejak dimulainya krisis pada tahun 2020, fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembatasan operasional usaha, serta penurunan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan angka pengangguran di berbagai daerah. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran akibat terjadinya PHK dan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor (Krisnandika & Aulia, 2021). Situasi ini kemudian menjadi titik awal pengamatan dalam penelitian ini, di mana tahun 2021 merepresentasikan fase awal pemulihan ekonomi setelah tekanan pandemi.

Jika ditinjau secara kolektif, rata-rata angka TPT di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berada di level 5,79%. Persentase tersebut mengkonfirmasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja masih dalam keadaan terdistorsi karena banyak sektor ekonomi yang belum sepenuhnya bangkit dari efek pandemi. Memasuki tahun 2022, angka rata-rata TPT menunjukan pergeseran ke posisi 5,35%, yang menandakan terjadinya masa transisi dari tahap pemulihan dini. Namun, pola penurunan ini mengindikasi bahwa berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, peningkatan investasi, serta program ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah mulai memberikan dampak positif terhadap daya serap tenaga kerja di Jawa Tengah.

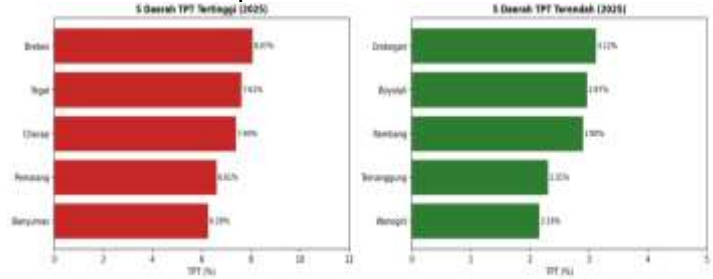
Tabel 1. Statistik Deskriptif Rata-rata TPT Jawa Tengah Tahun 2021–2025

Statistik	2021	2022	2023	2024	2025*
Rata-rata (%)	0,263194444	05.35	0,22638889	04.52	04.35
Minimum (%)	02.43	0,095833333	0,10555556	02.35	02.16
Maksimum (%)	0,442361111	0,419444444	0,40138889	08.35	08.07
Std. Deviasi	0,110416667	0,106944444	0,08819444	01.47	01.45

Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah (2021–2025); *) Estimasi

Tabel 1. memperlihatkan bahwa adanya tren rata-rata TPT Jawa Tengah selama 2021-2025 menunjukan pola yang cendenrung menurun secara bertahap. Meski sempat terjadi fluktuasi berupa kenaikan tipis pada 2022 akibat dampak kelanjutan pascapandemi, lintasan data setelahnya menunjukan tren penurunan yang stabil. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor struktural, antara lain: (1) pemulihan sektor manufaktur dan perdagangan yang menjadi basis ekonomi Jawa Tengah; (2) meningkatnya investasi langsung baik domestik maupun asing di kawasan industri; (3) program padat karya yang di gulirkan pemerintah daerah; serta (4) perkembangan sektor UMKM yang menjadi penyerap tenaga kerja informal terbesar di Provinsi ini. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi di Jawa Tengah didukung oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan yang berkembang cukup pesat. Perkembangan kedua sektor tersebut berperan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi penduduk yang berada pada usia produktif.

Di samping dinamika secara agregat, fenomena yang krusial untuk dicermati adalah disparitas antarwilayah yang sangat signifikan. Pada tahun 2021, nilai TPT terendah tercatat di Kabupaten Wonogiri sebesar 2,43%, sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Tegal sebesar 9,97%. Selisih yang mencapai lebih dari tujuh point persentase ini mengonfirmasi adanya asimetri struktural dalam karakteristik pasar tenaga kerja antardaerah. Hingga akhir periode pengamatan pada tahun 2025, pola kesenjangan ini tetap persisten; Kabupaten Wonogiri konsisten dengan tingkat pengangguran rendah (2,16%), sementara Kabupaten Brebes dan Tegal masih tertahan di atas ambang 7,5%. Kesenjangan yang persisten ini menunjukkan bahwa meskipun proses pemulihan berjalan, distribusi manfaat pemulihan tersebut tidak merata secara geografis.



Gambar 2. Perbandingan TPT Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah Tahun 2025

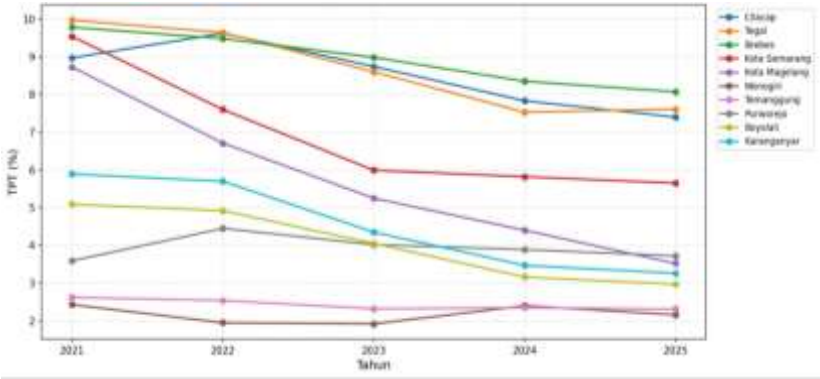
Gambar 2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2025, kelima daerah dengan TPT tertinggi adalah Kabupaten Brebes (8,07%), Kabupaten Tegal (7,61%), Kabupaten Cilacap (7,40%), Kota Tegal (5,82%), dan Kota Semarang (5,65%). Sebaliknya, daerah dengan TPT terendah adalah Kabupaten Wonogiri (2,16%), kabupaten Temanggung (2,31%), Kabupaten Rembang (2,90%), Kabupaten Purworejo (3,72%), dan Kabupaten Kudus (3,23%). Pola spasial ini menunjukan bahwa wilayah pesisir utara dan barat daya Jawa Tengah cenderung memiliki TPT lebih tinggi dibandingkan wilayah pedalaman selatan, yang mencerminkan adanya ketimpangan distribusi kesempatan kerja antarwilayah (Putri & Ash Shidiqie,2023). Kabupaten cilacap, Tegal, dan Brebes yang berada di kawasan pesisir mengandalkan sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi seperti perikanan, perdagangan informal, dan sektor jasa. Sementara itu, Kabupaten Wonogori dan Temanggung yang berbasis pertanian dan perkebunan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor primer yang relatif lebih stabil.

Tabel 2. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021–2025 (%)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Kab. Cilacap	0,40069444	0,41805556	0,38472222	0,34930556	07.40
2	Kab. Banyumas	06.05	06.05	06.35	06.18	06.26
3	Kab. Purbalingga	06.05	05.23	0,25069444	0,23333333	0,22430556
4	Kab. Banjarnegara	0,26805556	06.38	06.26	05.57	05.39
5	Kab. Kebumen	06.03	0,27222222	05.11	05.07	0,23263889
6	Kab. Purworejo	03.59	04.45	04.02	0,18680556	0,175
7	Kab. Wonosobo	05.26	05.01	0,23263889	04.02	0,19375
8	Kab. Magelang	05.03	0,23402778	04.42	03.55	03.52
9	Kab. Boyolali	05.09	0,23055556	04.05	03.16	0,15069444
10	Kab. Klaten	05.48	04.31	04.20	0,19236111	0,18611111
11	Kab. Sukoharjo	03.32	02.47	03.40	0,17013889	04.32
12	Kab. Wonogiri	02.43	0,10763889	0,10555556	02.40	02.16
13	Kab. Karanganyar	0,27013889	0,25694444	04.35	03.47	03.26
14	Kab. Sragen	0,21944444	0,21458333	0,18541667	03.53	03.49
15	Kab. Grobogan	04.38	04.40	04.02	03.23	03.12
16	Kab. Blora	0,18125	0,17361111	03.10	0,17152778	0,16736111
17	Kab. Rembang	0,17152778	0,09583333	0,125	0,14166667	0,14583333
18	Kab. Pati	0,20833333	04.45	04.29	0,18541667	0,17430556
19	Kab. Kudus	0,17847222	03.21	03.25	03.19	03.23
20	Kab. Jepara	04.23	04.10	03.35	03.34	03.30
21	Kab. Demak	05.28	06.11	05.38	0,21875	04.58
22	Kab. Semarang	05.02	0,22291667	04.05	0,17569444	0,16875
23	Kab. Temanggung	0,12638889	02.54	02.32	02.35	02.31
24	Kab. Kendal	05.48	07.34	0,26111111	05.01	0,20833333
25	Kab. Batang	06.59	0,29444444	06.06	0,25486111	05.07
26	Kab. Pekalongan	04.28	03.23	03.25	03.30	03.24
27	Kab. Pemalang	0,29930556	0,29375	06.55	0,29375	0,29236111
28	Kab. Tegal	0,44236111	0,41944444	0,375	07.53	0,33402778
29	Kab. Brebes	0,42916667	09.48	0,40138889	08.35	08.07
30	Kota Magelang	0,38402778	0,29930556	05.25	04.40	03.52
31	Kota Surakarta	0,35069444	0,26597222	04.58	0,20902778	04.50
32	Kota Salatiga	07.26	05.58	04.57	0,18472222	0,17152778
33	Kota Semarang	09.54	0,33333333	0,27708333	0,26527778	0,25347222
34	Kota Pekalongan	0,31180556	0,23472222	05.02	0,22986111	03.24
35	Kota Tegal	08.25	0,29722222	06.05	0,26944444	0,26527778

Rata-rata Provinsi	**0,26319444**	**05.35**	**0,22638889**	**04.52**	**04.35**

Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah (2021–2025); *) Estimasi



Gambar 3. Tren TPT Daerah Terpilih di Jawa Tengah Tahun 2021–2025 Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

Tabel 2 Analisis ini menampilkan dinamika TPT di sepuluh wilayah representatif di Jawa Tengah. Terlihat penurunan signifikan di kota besar seperti Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Kota Magelang, misalnya, menurunkan TPT dari 8,73% (2021) menjadi 3,52% (2025), didukung pemulihan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kota Surakarta juga mengalami penurunan dari 7,85% menjadi 4,50% berkat pertumbuhan ekonomi kreatif, batik, dan kuliner. Sebaliknya, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal mengalami penurunan lebih lambat akibat kendala struktural seperti dominasi sektor informal dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Kabupaten Kendal menunjukkan fluktuasi, dengan TPT naik dari 5,48% (2021) menjadi 7,34% (2022) akibat PHK, lalu turun ke 4,60% (2025) seiring pemulihan dan ekspansi industri. Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo justru mengalami kenaikan TPT dari 2,47% (2022) menjadi 4,32% (2025), yang mengindikasikan meningkatnya pengangguran terdidik akibat masuknya lulusan baru yang belum terserap pasar kerja. Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap TPT ini menegaskan beberapa indikator fundamental. Pertama, kendati tren di tingkat provinsi menunjukkan arah perbaikan, disparitas antarwilayah masih sangat lebar dan memerlukan atensi khusus dalam perumusan kebijakan. Kedua, wilayah dengan diversifikasi ekonomi yang lebih variatif terbukti memiliki daya pulih yang lebih akseleratif. Ketiga, daerah yang tingkat ketergantungannya tinggi pada sektor pertanian atau industri tunggal menunjukkan kerentanan yang lebih besar terhadap fluktuasi ekonomi. Kondisi tersebut secara konseptual memvalidasi teori human capital yang menempatkan kualitas sumber daya manusia yang berkorelasi erat dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu determinan utama ketahanan pasar kerja di suatu wilayah. Adapun implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah urgensi strategi pengembangan ekonomi terintegrasi; sebuah pendekatan yang tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan agregat, namun juga menitikberatkan pada pemerataan distribusi kesempatan kerja antardaerah

Analisis Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai Proksi Investasi Human Capital di Jawa Tengah Tahun 2021-2025

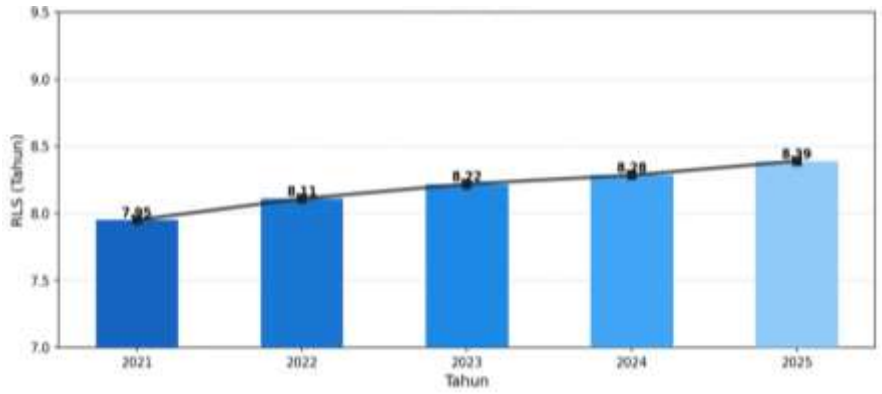
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting kualitas sumber daya manusia karena mencerminkan tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas sebagai bentuk investasi *human capital*. Peningkatan RLS menunjukkan naiknya tingkat pendidikan masyarakat yang

berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selama 2021–2025, RLS Jawa Tengah meningkat konsisten dari 7,95 menjadi 8,39 tahun. Meski kenaikannya relatif moderat, hal ini menunjukkan bertambahnya proporsi tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi. Peningkatan ini didukung program pemerintah seperti PIP dan perluasan akses pendidikan menengah, yang secara bertahap memperbaiki kualitas angkatan kerja.

Tabel 3. Statistik Deskriptif RLS Jawa Tengah Tahun 2021–2025

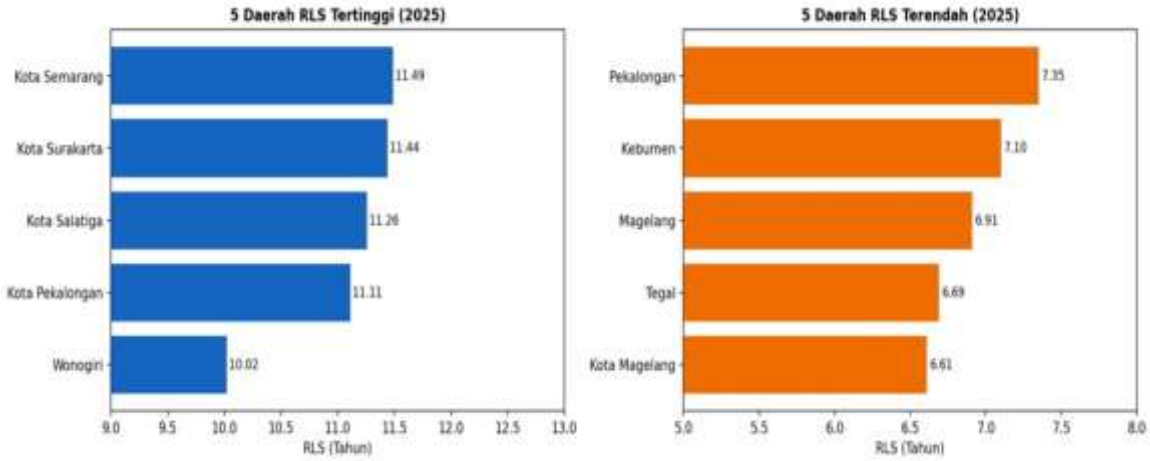
Statistik	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata (tahun)	0,357638889	08.11	08.22	08.28	08.39
Minimum (tahun)	06.22	06.35	06.40	06.41	0,292361111
Maksimum (tahun)	0,479166667	0,482638889	11.24	11.48	11.49
Std. Deviasi	01.22	01.24	01.28	01.35	01.30

Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah (2021–2025)



Gambar 3. Rata-Rata RLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021–2025 Sumber: BPS Jawa Tengah, Data Diolah

Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan stabil setiap tahun, menandakan dampak bertahap kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kenaikan ini terjadi karena generasi muda berpendidikan lebih tinggi mulai menggantikan penduduk usia 25+ tahun, sehingga secara jangka panjang meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, terdapat kesenjangan antarwilayah. Pada 2025, kota seperti Semarang, Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan memiliki RLS tertinggi (≈11 tahun) karena akses pendidikan dan kondisi ekonomi lebih baik. Sebaliknya, Kabupaten Tegal mencatat RLS terendah (6,69 tahun), menunjukkan rata-rata pendidikan masih rendah dan belum sesuai dengan tuntutan pasar kerja modern.



Gambar 4. Perbandingan RLS Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah Tahun 2025
Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

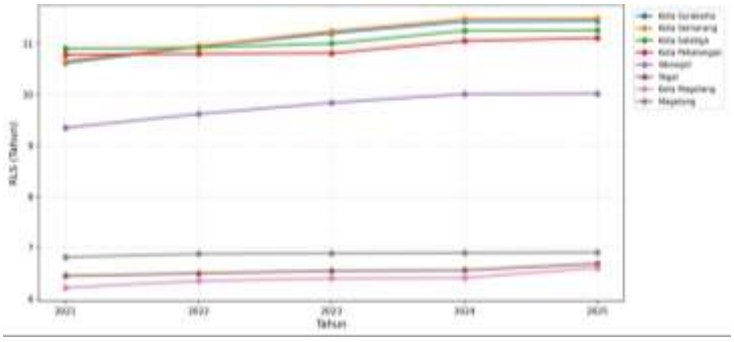
Gambar 4 secara jelas memperlihatkan perbedaan yang cukup tajam antara kota-kota besar dan kabupaten yang cenderung agraris dalam hal capaian RLS. Selisih yang hampir mencapai lima tahun antara Kota Semarang dengan RLS sebesar (11,49 tahun) dan Kabupaten Tegal dengan (6,69 tahun) pada tahun 2025 mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses maupun kualitas pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius dalam perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Selain itu, Kabupaten Magelang yang memiliki RLS (6,91 tahun) dan Kota Magelang dengan RLS (6,61 tahun), meskipun secara geografis berdekatan tetapi memiliki status administratif yang berbeda, juga menampilkan pola yang menarik. Walaupun Kota Magelang berperan sebagai pusat pemerintahan kota, capaian RLS-nya justru lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lainnya. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan karakteristik demografis penduduknya yang didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua dengan latar belakang pendidikan yang relatif terbatas.

Tabel 4. Data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021–2025 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Cilacap	0,34375	0,35625	08.01	08.02	08.15
2	Kab. Banyumas	07.09	07.18	07.39	07.40	0,33680556
3	Kab. Purbalingga	0,33541667	0,34583333	0,35208333	0,35486111	08.10
4	Kab. Banjarnegara	07.25	07.33	07.34	07.36	07.37
5	Kab. Kebumen	0,30208333	0,30833333	0,30972222	0,31041667	07.10
6	Kab. Purworejo	07.55	0,35069444	0,35138889	0,35208333	0,35347222
7	Kab. Wonosobo	08.21	08.32	08.46	0,37847222	0,38472222
8	Kab. Magelang	0,30694444	0,31111111	0,31180556	0,3125	0,31319444
9	Kab. Boyolali	0,34652778	0,34791667	0,34861111	0,34930556	08.04
10	Kab. Klaten	0,35069444	08.08	08.09	08.17	08.41
11	Kab. Sukoharjo	0,38958333	09.09	09.27	09.29	09.30
12	Kab. Wonogiri	09.35	0,41805556	0,43333333	10.01	10.02

13	Kab. Karanganyar	07.34	07.42	0,33819444	0,33888889	0,35069444
14	Kab. Sragen	08.57	0,38819444	09.02	09.26	09.27
15	Kab. Grobogan	0,3375	0,34652778	0,35208333	0,35277778	0,35347222
16	Kab. Blora	07.11	07.26	07.28	07.29	07.51
17	Kab. Rembang	0,31875	07.01	07.08	07.26	07.45
18	Kab. Pati	07.30	07.41	0,34166667	0,34236111	0,35347222
19	Kab. Kudus	07.48	0,34652778	0,34722222	0,34861111	08.09
20	Kab. Jepara	0,38611111	09.06	09.34	09.35	09.51
21	Kab. Demak	0,34652778	08.09	08.26	08.27	08.28
22	Kab. Semarang	0,35138889	08.10	08.27	08.28	08.29
23	Kab. Temanggung	08.03	08.05	08.07	08.16	08.17
24	Kab. Kendal	07.25	07.41	07.50	07.53	0,33402778
25	Kab. Batang	07.46	0,34097222	0,34236111	0,34305556	0,35902778
26	Kab. Pekalongan	0,31111111	0,3125	07.07	07.08	07.35
27	Kab. Pemalang	07.17	07.46	07.47	07.48	07.50
28	Kab. Tegal	06.45	06.50	06.55	06.56	0,29791667
29	Kab. Brebes	0,31875	07.25	07.34	07.36	07.37
30	Kota Magelang	06.22	06.35	06.40	06.41	0,29236111
31	Kota Surakarta	0,45972222	0,48194444	11.20	11.43	11.44
32	Kota Salatiga	0,47916667	0,48055556	11.00	11.25	11.26
33	Kota Semarang	0,4625	0,48263889	11.24	11.48	11.49
34	Kota Pekalongan	0,47083333	0,47222222	0,47291667	11.05	11.11
35	Kota Tegal	09.18	09.20	09.29	09.34	09.35
	Rata-rata Provinsi	**0,35763889**	**08.11**	**08.22**	**08.28**	**08.39**

Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah (2021–2025)



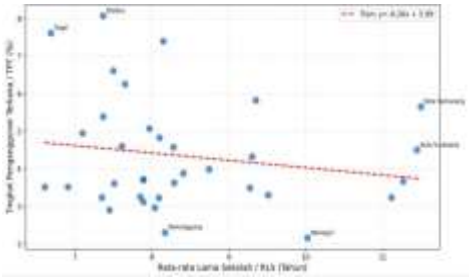
Gambar 5. Tren RLS Daerah Terpilih di Jawa Tengah Tahun 2021–2025 Sumber: BPS Jawa Tengah)
Sumber: BPS Jawa Tengah

Gambar 5 Tren RLS pada delapan daerah menunjukkan bahwa kota besar seperti Surakarta, Semarang, dan Salatiga secara konsisten memiliki RLS di atas 10 tahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Wonogiri juga menonjol di antara wilayah kabupaten dengan capaian RLS yang mencapai 10,02 tahun pada 2025, yang mencerminkan kuatnya budaya pendidikan masyarakat. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Tegal, Magelang, dan Kebumen mengalami peningkatan yang lebih lambat, mengindikasikan masih adanya kendala sosial-ekonomi dalam mendorong akses pendidikan yang lebih tinggi.

Hubungan antara RLS dan TPT tidak sepenuhnya linier. Daerah dengan RLS tinggi seperti Kota Semarang masih memiliki pengangguran tinggi, sementara Kabupaten Wonogiri mampu menjaga TPT rendah. Hal ini menunjukkan adanya pengangguran terdidik akibat *skill mismatch* serta kecenderungan tenaga kerja terdidik lebih selektif (pengangguran friksional). Meski demikian, peningkatan RLS tetap penting dalam jangka panjang karena meningkatkan kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu penguatan kebijakan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemberian beasiswa, serta penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri agar lebih efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Pendidikan sebagai Investasi Human Capital terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam bagian ini, analisis deskriptif komparatif lintas wilayah digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara indikator pendidikan, khususnya RLS, dan TPT. Metode yang digunakan adalah untuk membandingkan profil daerah berdasarkan posisi RLS dan TPT secara bersamaan, kemudian menemukan pola-pola yang muncul dalam data untuk memberikan interpretasi yang relevan secara teori.



Gambar 6. Hubungan RLS dan TPT di Jawa Tengah Tahun 2025 Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

Diagram pencar (scatter plot) antara RLS dan TPT untuk seluruh 35 kabupaten/kota Jawa Tengah pada tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 3.10. Garis tren yang ditambahkan menunjukkan kemiringan positif, yang secara deskriptif menunjukkan bahwa wilayah dengan RLS yang lebih tinggi juga cenderung memiliki TPT yang lebih tinggi. Namun, hubungan ini menunjukkan bahwa RLS bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi TPT; sebaran data menunjukkan dua kelompok utama: (1) kelompok kabupaten dengan RLS sedang (7–9 tahun) dan TPT rendah-sedang (2–6%), yang biasanya terdiri dari kabupaten pertanian dan agroindustri; dan (2) kelompok kota besar dengan RLS tinggi (>10 tahun) namun TPT yang berbeda, yang menunjukkan dinamika pasar kerja perkotaan yang lebih kompleks.

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi biasanya ditemukan di kelompok kota besar ini, terutama karena banyak pendatang yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, yang meningkatkan penyebut dalam perhitungan TPT.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut, beberapa area menunjukkan anomali yang menarik. TPT tertinggi di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Brebes dan Tegal, masing-masing dengan RLS relatif rendah (sekitar 7,37 dan 6,69 tahun). Ini menentang argumen sederhana bahwa RLS rendah seharusnya berkorelasi dengan kemudahan penyerapan di sektor informal. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi yang lamban di kedua wilayah tersebut, tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah, dan ketergantungan pada sektor pertanian yang padat musiman. Namun, meskipun memiliki RLS tinggi (10,02 tahun), Kabupaten Wonogiri memiliki TPT terendah (2,16%). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak penduduk Wonogiri yang berpendidikan tinggi pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian dan jasa lokal yang lebih kompetitif (Salsabhila & Sakti, 2025).

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa memahami hubungan antara pendidikan dan pengangguran tidak dapat dilakukan secara mekanistis dalam analisis deskriptif. Faktor-faktor kontekstual seperti intensitas investasi, struktur ekonomi daerah, dan mobilitas tenaga kerja harus dipertimbangkan. Pengembangan kapasitas tenaga kerja bergantung pada investasi human capital melalui pendidikan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tersedianya lapangan kerja yang memenuhi kualifikasi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan RLS agar permintaan tenaga kerja terdidik dapat meningkat (Yanti, 2021). Hal ini dilakukan agar investasi pendidikan dapat menghasilkan return yang optimal baik bagi individu maupun bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Peran Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum dalam Menjelaskan Tingkat Pengangguran

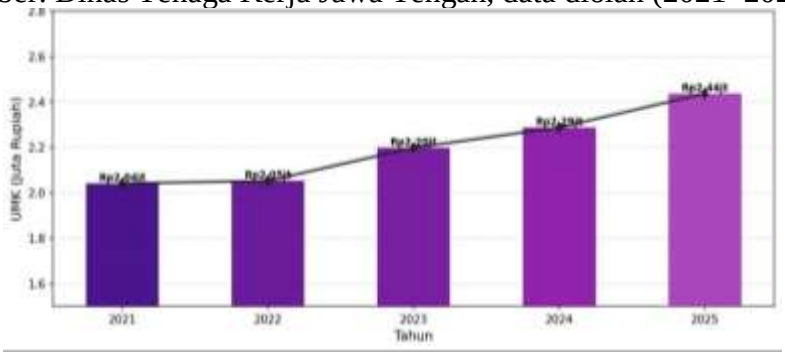
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) bagi tenaga kerja di sektor formal. UMK mencerminkan standar minimum kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja, sehingga secara teoritis berkaitan erat dengan dinamika penyerapan tenaga kerja. Upah minimum yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan komitmen tenaga kerja, menurut teori upah efisiensi (efficiency wage theory). neoklasik, penetapan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan pengangguran. Analisis berikut mendeskripsikan perkembangan UMK di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah selama 2021– 2025 dan kaitannya dengan dinamika TPT.

Secara agregat, rata-rata UMK Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode penelitian. Pada tahun 2021, rata-rata UMK Jawa Tengah tercatat sebesar Rp 2.041.504, meningkat menjadi Rp 2.052.653 pada 2022, kemudian mengalami kenaikan lebih besar pada 2023 menjadi Rp 2.198.563. Pada 2024, rata-rata UMK telah mencapai Rp 2.287.760, dan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.437.074. Kenaikan UMK yang paling signifikan terjadi antara 2022 dan 2023, yang merupakan respons terhadap kenaikan inflasi pascapandemi serta tekanan dari serikat pekerja yang menuntut penyesuaian upah setelah beberapa tahun pertumbuhan upah yang tertekan. Kenaikan UMK ini juga sejalan dengan meningkatnya biaya hidup di berbagai daerah akibat normalisasi ekonomi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Tabel 6. Statistik Deskriptif UMK Jawa Tengah Tahun 2021–2025 (Rupiah)

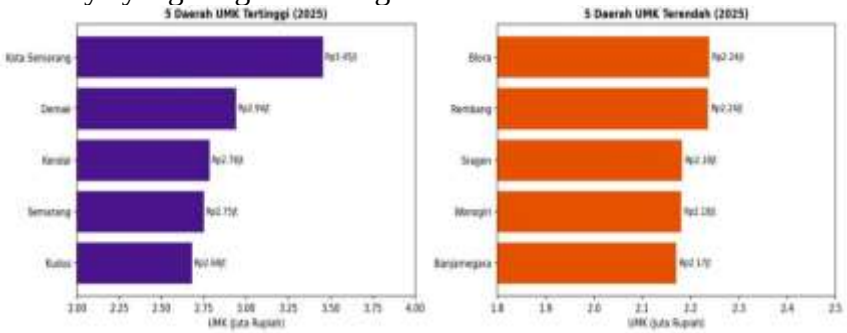
Statistik	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata (Rp)	2.041.504	2.052.653	2.198.563	2.287.760	2.437.074
Minimum (Rp)	1.805.000	1.819.835	1.958.170	2.038.005	2.170.475
Maksimum (Rp)	2.810.025	2.835.021	3.060.349	3.243.969	3.454.827

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, data diolah (2021–2025)



Gambar 7. Rata-rata UMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021–2025 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, data diolah

Gambar 7 menunjukkan bahwa rata-rata UMK Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup tajam dari 2021 hingga 2025. Kenaikan tertinggi terjadi antara 2022 dan 2023, yang mencerminkan kebijakan pemerintah untuk membuat formula kenaikan upah minimum yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selama periode ini, UMK di beberapa kabupaten/kota Jawa Tengah naik lebih dari 7%, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kenaikan UMK yang signifikan ini, ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja di sektor formal merasa lebih baik, dan yang kedua adalah bahwa pengusaha mungkin kurang tertarik untuk merekrut tenaga kerja baru, terutama di sektor padat karya yang sangat bersaing di seluruh dunia.



Gambar 8. Perbandingan UMK Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah Tahun 2025 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, data diolah

Variasi UMK di antara daerah sangat mencerminkan perbedaan ekonomi dan biaya hidup. Kota Semarang memiliki UMK tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp 3.454.827, jauh melampaui rata-rata provinsi. Dengan biaya hidup yang lebih tinggi dan produktivitas tenaga kerja rata-rata yang lebih tinggi, status Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi dan bisnis

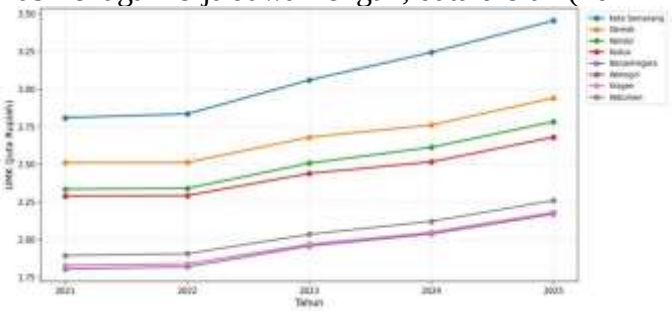
utama Jawa Tengah mendukung posisi ini. Dengan UMK Rp 2.940.716, Kabupaten Demak berada di posisi kedua, diikuti oleh Kabupaten Kendal (Rp 2.783.455) dan Kabupaten Semarang (Rp 2.750.136). Daerah-daerah di sekitar Kota Semarang memiliki UMK tinggi karena berada di kawasan industri besar, di mana perusahaan besar harus memberikan kompensasi yang kompetitif untuk menarik karyawan. Pada sisi lain, UMK terendah pada tahun 2025 ditetapkan untuk Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 2.170.475, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 2.180.588 dan Kabupaten Sragen sebesar Rp 2.182.200.

Tabel 6. Data UMK Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021–2025 (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Cilacap	2.228.904	2.230.732	2.383.090	2.479.106	2.640.248
2	Kab. Banyumas	1.970.000	1.983.262	2.118.124	2.195.690	2.338.410
3	Kab. Purbalingga	1.988.000	1.996.815	2.130.981	2.195.571	2.338.283
4	Kab. Banjarnegara	1.805.000	1.819.835	1.958.170	2.038.005	2.170.475
5	Kab. Kebumen	1.895.000	1.906.782	2.035.890	2.121.947	2.259.874
6	Kab. Purworejo	1.905.400	1.911.851	2.043.902	2.127.641	2.265.938
7	Kab. Wonosobo	1.920.000	1.931.285	2.076.209	2.159.175	2.299.521
8	Kab. Magelang	2.075.000	2.081.807	2.236.777	2.316.890	2.467.488
9	Kab. Boyolali	2.000.000	2.010.299	2.155.712	2.250.327	2.396.598
10	Kab. Klaten	2.011.515	2.015.623	2.152.323	2.224.012	2.389.873
11	Kab. Sukoharjo	1.986.450	1.998.153	2.138.248	2.215.482	2.359.488
12	Kab. Wonogiri	1.827.000	1.839.044	1.968.448	2.047.500	2.180.588
13	Kab. Karanganyar	2.054.040	2.064.313	2.207.484	2.288.366	2.437.110
14	Kab. Sragen	1.829.500	1.839.430	1.969.569	2.049.000	2.182.200
15	Kab. Grobogan	1.890.000	1.894.032	2.029.569	2.116.516	2.254.090
16	Kab. Blora	1.894.000	1.904.197	2.040.080	2.101.813	2.238.431
17	Kab. Rembang	1.861.000	1.874.322	2.015.927	2.099.689	2.236.169
18	Kab. Pati	1.953.000	1.968.339	2.107.697	2.190.000	2.332.350
19	Kab. Kudus	2.290.995	2.293.058	2.439.814	2.516.888	2.680.486
20	Kab. Jepara	2.107.000	2.108.403	2.272.627	2.450.915	2.610.224
21	Kab. Demak	2.511.526	2.513.006	2.680.421	2.761.236	2.940.716
22	Kab. Semarang	2.302.798	2.311.254	2.480.988	2.582.287	2.750.136
23	Kab. Temanggung	1.885.000	1.887.832	2.027.569	2.109.690	2.246.850
24	Kab. Kendal	2.335.735	2.340.312	2.508.300	2.613.573	2.783.455
25	Kab. Batang	2.129.117	2.132.535	2.282.026	2.379.702	2.534.383
26	Kab. Pekalongan	2.084.155	2.094.646	2.247.346	2.334.886	2.486.654
27	Kab. Pemalang	1.926.000	1.940.890	2.081.783	2.156.000	2.296.140
28	Kab. Tegal	1.958.000	1.968.446	2.106.238	2.191.161	2.333.586
29	Kab. Brebes	1.866.723	1.885.019	2.018.837	2.103.100	2.239.802
30	Kota Magelang	1.914.000	1.935.913	2.066.007	2.142.000	2.281.230

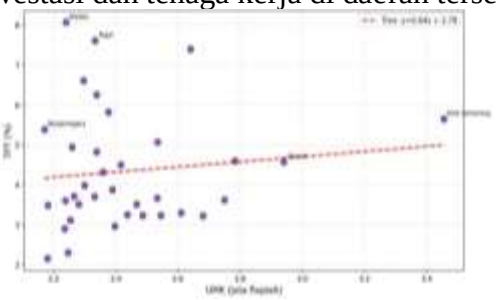
31	Kota Surakarta	2.013.810	2.035.720	2.174.169	2.269.070	2.416.560
32	Kota Salatiga	2.101.457	2.128.523	2.284.180	2.378.951	2.533.583
33	Kota Semarang	2.810.025	2.835.021	3.060.349	3.243.969	3.454.827
34	Kota Pekalongan	2.139.754	2.156.214	2.305.823	2.389.801	2.545.138
35	Kota Tegal	1.982.750	2.005.931	2.145.012	2.231.628	2.376.684
	Rata-rata Provinsi	**2.041.504**	**2.052.653**	**2.198.563**	**2.287.760**	**2.437.074**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, data diolah (2021–2025)



Gambar 9. Tren UMK Daerah Terpilih di Jawa Tengah Tahun 2021–2025 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, data diolah

Gambar 9 menunjukkan tren UMK di delapan daerah terpilih di Jawa Tengah, menunjukkan spektrum dari UMK tertinggi hingga terendah. Kota Semarang selalu berada jauh di atas wilayah lainnya, dan jarak tersebut semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, UMK di Kabupaten Demak dan Kendal meningkat secara signifikan, menunjukkan ekspansi aktivitas industri di koridor industri Semarang-Kendal. Di sisi lain, UMK di Kabupaten Banjarnegara dan Sragen relatif rendah dan stagnan, menunjukkan rendahnya aktivitas investasi industri formal di kedua wilayah tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan UMK sangat erat terkait dengan intensitas investasi industri di suatu daerah. Pada gilirannya, ini akan mempengaruhi daya tarik investasi dan tenaga kerja di daerah tersebut.



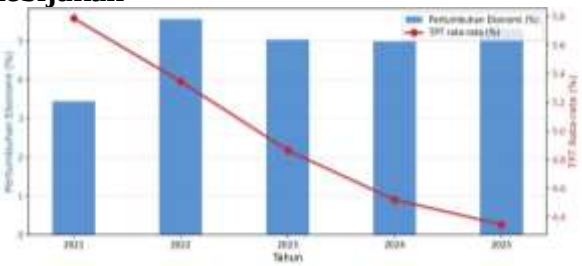
Gambar 10. Hubungan UMK dan TPT di Jawa Tengah Tahun 2025 Sumber: BPS Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja, data diolah

Plot scatter antara UMK dan TPT pada tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 3.11. Garis tren menunjukkan kemiringan yang positif, yang menunjukkan bahwa wilayah dengan UMK yang lebih tinggi juga cenderung memiliki TPT yang sedikit lebih tinggi. Jika dilihat dari luar, pola ini terlihat paradoks. Namun, ada beberapa cara untuk menjelaskannya secara teoritis. Daerah yang memiliki UMK tinggi, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Demak, memiliki banyak konsentrasi industri dan menarik banyak migran pencari kerja dari daerah lain. TPT terus meningkat sebagai akibat dari masuknya banyak pencari kerja dari luar daerah yang meningkatkan

angkatan kerja lebih cepat dari yang dapat diterima oleh sektor formal. Dalam literatur ekonomi tenaga kerja, istilah "pengangguran kota" mengacu pada kenyataan bahwa kota-kota dengan prospek ekonomi yang lebih baik menarik pengangguran karena tingginya migrasi dari daerah pedesaan. Sebaliknya, daerah dengan UMK rendah tetapi TPT rendah, seperti Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Temanggung, memiliki pasar tenaga kerja yang lebih tertutup dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi, sehingga lebih sedikit persaingan untuk pekerjaan.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami bahwa UMK bukan hanya berfungsi sebagai penentu biaya tenaga kerja bagi perusahaan tetapi juga berfungsi sebagai indikator kualitas kehidupan karyawan. Peningkatan UMK yang konsisten di seluruh Jawa Tengah selama 2021–2025 menunjukkan peningkatan kemampuan daya beli tenaga kerja dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, seberapa jauh kebijakan upah tersebut diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan dari investasi pendidikan dan pelatihan. Fokus analisis penelitian ini adalah hubungan triadik antara pendidikan, UMK, dan TPT. Hubungan ini saling mempengaruhi dalam dinamika yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain (Arifah & Cahyono, 2025).

Implikasi Teoretis dan Kebijakan



Gambar 11. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata TPT Jawa Tengah Tahun 2021–2025 Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

Gambar 11 menunjukkan hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan TPT di Jawa Tengah selama 2021–2025. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat (misalnya 5,6% pada 2022), TPT cenderung menurun, sedangkan pada 2021 yang masih terdampak pandemi (3,4%), TPT relatif lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan hukum Okun, bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan pengangguran, sehingga kebijakan pemulihan ekonomi menjadi kunci penurunan TPT.

Secara teoretis, hasil ini mendukung teori human capital yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Namun, hubungan antara RLS dan TPT tidak selalu linier karena dipengaruhi faktor lain seperti struktur ekonomi, investasi, mobilitas tenaga kerja, dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri. Dari sisi kebijakan, beberapa rekomendasi utama meliputi: peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah dengan RLS rendah; penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri; kolaborasi perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mengatasi pengangguran terdidik; serta penetapan UMK yang selaras dengan produktivitas agar tidak menekan penyerapan tenaga kerja.

Keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan adalah syarat utama untuk mengurangi pengangguran. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memprioritaskan diversifikasi ekonomi daerah, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Ini terutama berlaku untuk kota dan kabupaten yang ekonominya didominasi oleh sektor pertanian atau industri tertentu yang rentan terhadap pengaruh luar. Dengan membangun

kawasan industri baru dan infrastruktur konektivitas yang memadai di daerah yang selama ini tertinggal dalam investasi, akan ada banyak peluang kerja baru dan tenaga kerja terdidik tidak perlu bermigrasi ke kota-kota besar. Secara keseluruhan, rekomendasi ini mencapai satu kesimpulan utama: pengurangan pengangguran di Jawa Tengah memerlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan secara sinergis dan berkesinambungan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengembangan ekonomi.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah periode 2021–2025 cenderung menurun seiring pemulihan ekonomi pascapandemi, sementara rata-rata lama sekolah meningkat secara konsisten. Namun, masih terdapat disparitas antarwilayah, di mana beberapa daerah perkotaan dengan pendidikan tinggi justru memiliki pengangguran lebih besar akibat mismatch keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai investasi *human capital* penting, tetapi perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan kesesuaian dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi pendidikan, khususnya di wilayah dengan capaian rendah, serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja melalui vokasi dan pelatihan. Selain itu, pengembangan lapangan kerja berbasis potensi daerah perlu ditingkatkan agar penyerapan tenaga kerja lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arizal, M., Pratama, R., & Nugroho, S. (2025). Regional economic development and labor market dynamics in Central Java. *Economic Policy Review*, 9(1), 45–60.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2025*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Herdiwiguna, A., & Fadli, M. (2025). Labor market structure and unemployment dynamics in Indonesia. *Indonesian Journal of Labor Economics*, 7(1), 21–38.

Hidayat, R., & Saputra, A. (2023). Analisis laporan keuangan dalam menilai efisiensi operasional perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 112–125.

Lestari, W., & Pratama, M. R. (2021). Peran sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan strategis pada masa pandemi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 201–215.

Lestari, I. D., Sulistiyaningsih, N. A., Sibatuara, T. C., Nilasari, A., & Arisetyawan, K. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2020–2023. INDEPENDENT: Journal of Economics, 4(3), 1–10.

Mulyadi, A., Badriah, L. S., & Arifin, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 8(1), 10–23.

Ningsih, S., dkk. (2024). Evaluasi standar akuntansi keuangan (SAK) dalam pelaporan laba rugi perusahaan sektor konsumsi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(1), 10–24.

Rasnino, C. A., Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2022). Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2014–2019. Jurnal Impresi Indonesia (JII), 1(3). https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.29

Retno, M., & Fardinah. (2024). Tingkat pengangguran terbuka periode sebelum hingga sesudah pandemi Covid-19 dengan pendekatan non-parametrik. ESTIMATOR: Journal of Applied Statistics, Mathematics, and Data Science, 2(1), 1–9.

Salsabhila, R., & Sakti, R. (2025). Investment, economic growth, and unemployment in Java Island. *Journal of Regional Economic Analysis*, 10(2), 88–102.

Sari, N. P., & Wijaya, K. (2022). Dampak digitalisasi akuntansi terhadap akurasi laporan keuangan pada perusahaan terbuka. *Media Riset Akuntansi*, 12(3), 88–103.

Wahyulianti, D., Setiawan, B., & Rahmawati, S. (2025). The role of education in improving employment opportunities in Central Java. *Journal of Human Resource Economics*, 8(1), 33–48.

Yanti, L. (2021). Human capital development and its impact on economic growth. *Journal of Development Economics*, 15(3), 201–214.

Arifah, S. I., & Cahyono, H. (2025). The Effect of Average Years of Schooling, Open Unemployment Rate, and Labor Force Participation Rate on the Poor Population i Central Java Province in 2010-2024. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 9(04), 384-394.

Herdiwiguna, R., & Fadli, F. (2025). The Impact of Inflation, Economic Growth, Health, and Education on Unemployment in Java (2014-2023). Journal of Development Economic and Social Studies, 4(2)

Wahyulianti, K., Septiani, E. D., Haryanti, Y., Setianingrum, R., & Farliana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Gender terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2019-2022. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 10(1), 75-86.

Salsabhila, A., & Sakti, R. K. (2025). Analysis of the Effects of Economic Growth, Investment, Education, and Technology on Open Unemployment Rate in Java. Journal of Development Economic and Social Studies, 4(4).

Arizal, M., Firmansyah, M., & Husein, F. (2025). Peran Human Capital pada Hubungan Investasi dan Pengangguran: Dynamic Panel Approach. IKRAITH-EKONOMIKA, 8(3), 919-925.

Yanti, N., Nurtati, N., & Misharni, M. (2020). Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 6(1), 21-37.